



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Katalog : 9201002.73

Analisis **ICOR**

Satuan Wilayah
Pembangunan

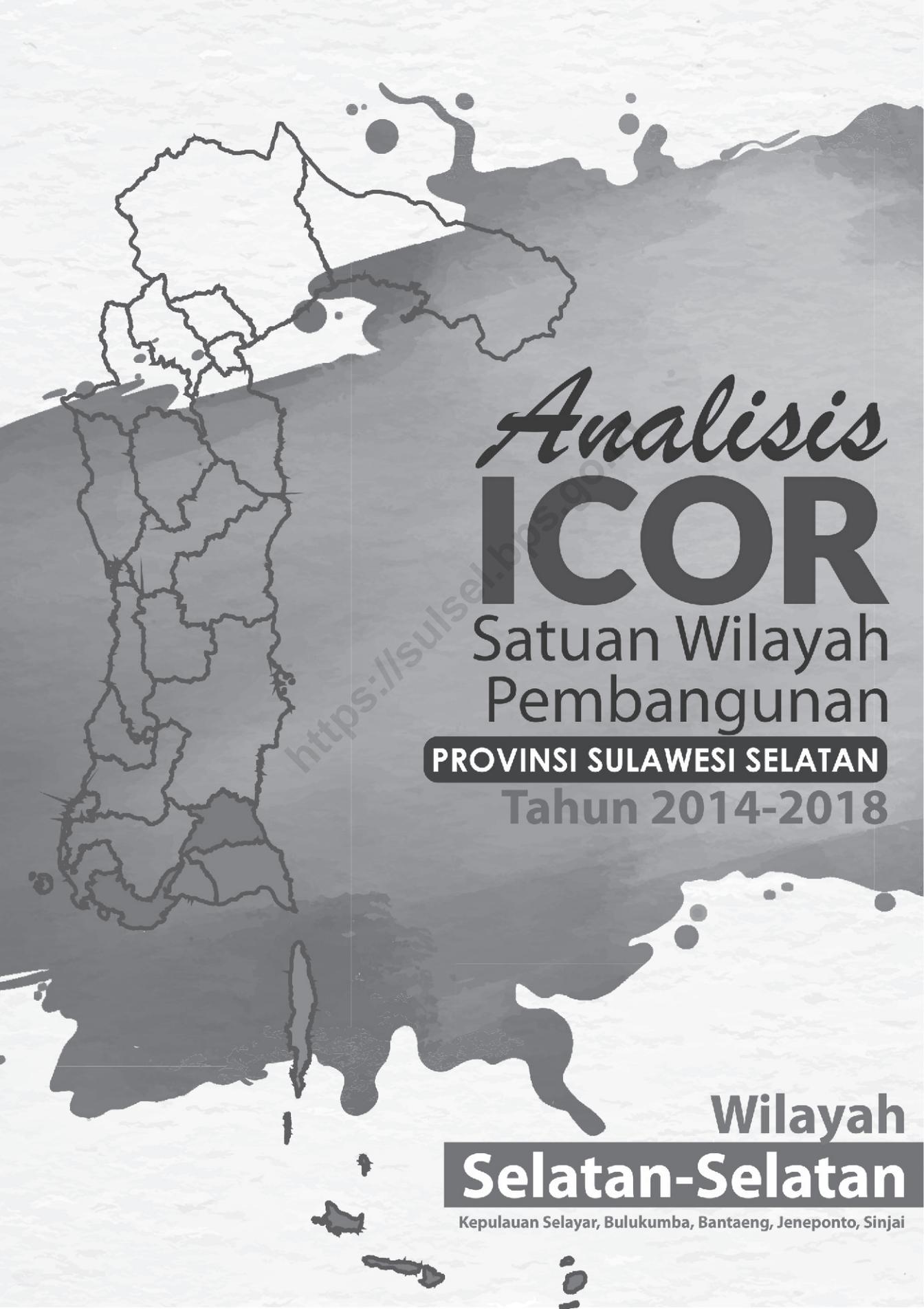
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tahun 2014-2018

Wilayah

Selatan-Selatan

Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Sinjai



Analisis
ICOR

Satuan Wilayah
Pembangunan

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tahun 2014-2018

Wilayah

Selatan-Selatan

Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Sinjai

Analisis ICOR Satuan Wilayah Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018: Wilayah Selatan-Selatan

ISBN : 978-623-7581-31-4
No. Publikasi : 73550.2019
Katalog : 9201002.73

Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : vii + 52 halaman

Naskah:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Penyunting:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Desain Kover oleh:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Penerbit:
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Pencetak:
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber Ilustrasi: -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum
Yos Rusdiansyah

Penanggungjawab Teknis
Didik Nursetyohadi

Penyunting
Muhammad Ilham Mubarak
Joko Siswanto

Penulis
Rosyita Darojati A'laa

Desain Cover dan Layout
Muhammad Ilham Mubarak

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://pulsel.bps.go.id>

Kata Pengantar

Investasi merupakan bagian penting yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan suatu wilayah. Besar kecilnya investasi akan berpengaruh pada perekonomian wilayah tersebut. Sehingga ketersediaan data investasi dan analisis yang terkait dengan investasi sangat diperlukan pemerintah daerah guna mengetahui efisiensi dari investasi yang telah dilakukan (baik oleh pemerintah maupun swasta) serta dalam rangka menentukan kebutuhan investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Publikasi Analisis ICOR Satuan Wilayah Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018 merupakan publikasi baru yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Publikasi ini memberikan gambaran besarnya ICOR dan tingkat efisiensi dari suatu investasi yang terbentuk di setiap kab/kota dan wilayah-wilayah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, publikasi ini juga menyajikan dan menganalisis ketimpangan investasi yang terjadi di setiap wilayah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Semoga publikasi ini bisa memberikan informasi berharga bagi para pengguna data BPS, baik pemerintah maupun publik, dan diharapkan publikasi ini bisa menjadi sumber informasi yang berguna untuk berbagai tujuan

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan membantu dalam penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran akan sangat berharga untuk penyempurnaan publikasi selanjutnya.

Makassar, Juni 2020

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Yos Rusdiansyah



Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://pulsel.bps.go.id>

Daftar Isi

v	Kata Pengantar (i)
vii	Daftar Isi (iii)
1	BAB I Pendahuluan
7	BAB II Konsep dan Metodologi
9	2.1. Pengertian investasi dan PMTB
13	2.2. Pengertian ICOR
14	2.3. Metodologi penghitungan ICOR
23	BAB III Perkembangan Perekonomian Wilayah Selatan-Selatan
25	3.1. Tinjauan dari Sisi PDRB Lapangan Usaha
28	3.2. Tinjauan dari Sisi PDRB Pengeluaran
29	BAB IV Perkembangan Investasi, ICOR, dan Ketimpangan Investasi Wilayah Selatan-Selatan
31	4.1. Perkembangan Investasi
33	4.2. ICOR 2014-2018
35	4.3. Ketimpangan Investasi Wilayah
37	BAB V Kesimpulan
41	Lampiran Tabel

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://pulsel.bps.go.id>



BAB I

PENDAHULUAN

<https://sulsel.pps.go.id>

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://pulsel.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

Secara tradisional, pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto untuk skala negara atau peningkatan yang terus menerus pada Produk Domestik Regional Bruto untuk skala provinsi, kabupaten, atau kota. Dalam konteks daerah, pembangunan suatu daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antar pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999; Blakely, 1989). Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antar daerah dan antarsektor.

Meskipun pada akhir dasawarsa 1960-an banyak negara berkembang mulai menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak identik dengan pembangunan ekonomi, dan berkeyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (*necessary*) tetapi tidak mencukupi (*sufficient*) bagi proses pembangunan (Esmara, 1986: 12; Meier, 1989: 7), namun pada praktiknya di banyak negara setidaknya pada tahap awal pembangunan umumnya berfokus pada peningkatan produksi. Meskipun banyak varian pemikiran, pada dasarnya kata kunci dalam pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal dari luar dan melakukan industrialisasi.

Menurut pandangan para ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill) maupun ekonom neoklasik (Robert Solow dan Trevor Swan) ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 1985). Artinya, tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan. Semakin besar investasi maka semakin besar tingkat pertumbuhan yang dicapai. Sebaliknya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin besar pendapatan yang dapat ditabung dan investasi akan meningkat (Todaro, 2003).

Determinan penting yang berpengaruh terhadap pembentukan output perekonomian di suatu wilayah adalah stok kapital. Dalam model pertumbuhan Harrod-Domar dinyatakan bahwa output merupakan fungsi dari stok kapital dan tenaga kerja pada tingkat teknologi tertentu (Hess and Ross, 1997). Investasi akan meningkatkan

stok kapital, sedangkan depresiasi/penyusutan akan mengurangi stok kapital (Mankiw, 2007). Kenaikan stok kapital akan meningkatkan kapasitas suatu wilayah dalam proses penciptaan output perekonomian. Dengan demikian, investasi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal ini menyebabkan persediaan modal bertambah (Mankiw, 2007:186). Pertambahan investasi kemudian akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan ekonomi dapat berkembang dengan adanya pertambahan faktor-faktor produksi, terutama penambahan peralatan produksi dan perbaikan faktor-faktor produksi tersebut. Pengerahan atau mobilisasi dana tabungan guna menciptakan bekal investasi dalam jumlah yang memadai dibutuhkan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2003:113).

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sumber-sumber pembiayaan bisa berasal dari ekspor, bantuan luar negeri, investasi asing dan tabungan domestik (Kuncoro, 1997:215). Adapun alokasi modal yang kita kenal sebagai investasi, utamanya berasal dari dua sumber yakni baik PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing). Investasi yang berasal dari dalam negeri/ domestik maupun luar negeri/nondomestik akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi tidak hanya menaikkan permintaan agregat, tetapi juga menaikkan penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang, investasi meningkatkan stok kapital dan setiap penambahan stok kapital akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan yang terkait dengan investasi adalah *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Nilai ICOR menunjukkan jumlah investasi baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Besaran ICOR diperoleh dari perbandingan tambahan kapital dengan tambahan output. ICOR tersebut digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dari suatu investasi. Jika koefisien ICOR bernilai negatif atau nilai relatif besar dapat menunjukkan bahwa terjadi *inefficiency* dalam investasi. Kondisi investasi yang efisien akan terjadi pada koefisien ICOR yang nilainya relatif kecil. Namun demikian, untuk menilai tingkat efisiensi suatu investasi juga mempertimbangkan karakteristik perekonomian suatu wilayah apakah bersifat *capital intensive* atau *labor intensive*.

Semakin tinggi nilai ICOR memberikan indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. ICOR yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal. Efisiensi terjadi akibat adanya perbaikan teknologi, sehingga semakin rendah ICOR maka penggunaan modal semakin efisien dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 1988). Widodo (1990) menyatakan bahwa, produktivitas

investasi dapat dikatakan baik apabila nilai ICOR berada pada kisaran 3 - 4.

Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Informasi mengenai potensi investasi dan iklim investasi daerah sangat diperlukan investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk investasi. Untuk melihat keterkaitan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan indikator ICOR. Nilai ICOR dapat merefleksikan besarnya produktivitas kapital yang akan berpengaruh terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi. Kajian mengenai ICOR menjadi sangat penting dan menarik untuk mendorong peningkatan investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kajian tersebut diharapkan dapat mengetahui penyebab tingginya angka ICOR, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi bahan kebijakan yang tepat dalam rangka mendorong investasi yang akhirnya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata.

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://counsel.bps.go.id>



BAB II

**KONSEP DAN
METODE
PERHITUNGAN**

<http://sulsei.201908>

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://pulsel.bps.go.id>

BAB II

KONSEP DAN METODE PERHITUNGAN

2.1. Pengertian Investasi

Investasi sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Untuk menghasilkan output, selain membutuhkan bahan baku dan tenaga kerja juga diperlukan barang modal yang digunakan dalam proses produksi. Dengan investasi diharapkan dapat menambah stok kapital dan pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas produksi. Dengan demikian, output dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Dalam jangka panjang akumulasi investasi dapat mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah/negara.

Pemahaman kondisi tersebut memberikan pengertian pentingnya informasi investasi. Berdasarkan *System of National Accounts* (SNA), besarnya investasi yang direalisasikan di suatu wilayah/negara pada suatu tahun tertentu adalah sama dengan jumlah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ditambah perubahan inventori/stok. SNA adalah buku panduan yang diterbitkan oleh *United Nations* (PBB) mengenai penyusunan neraca nasional. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada suatu tahun tertentu dalam bentuk berbagai jenis barang modal, seperti: bangunan, mesin-mesin, alat-alat transportasi, dan barang modal lainnya; sedangkan inventori/stok meliputi output setengah jadi, atau input yang belum digunakan, termasuk juga barang jadi yang belum dijual. Inventori/stok termasuk dalam modal kerja yang merupakan bagian investasi yang direncanakan. Perubahan inventori merupakan selisih antara stok akhir dengan stok awal pada suatu periode tertentu.

Investasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: fisik, finansial, dan sumber daya manusia (SDM). Investasi yang berwujud fisik dapat berupa: jalan, jembatan, gedung, kantor, mesin-mesin, mobil dan sebagainya. Investasi finansial dapat berupa: pembelian surat berharga, pembayaran premi asuransi, penyertaan modal dan investasi keuangan lainnya. Sedangkan investasi SDM dapat berupa pendidikan dan pelatihan. Dalam kajian ini, lebih ditekankan pada investasi fisik.

Konsep investasi yang digunakan dalam penghitungan ICOR mengacu pada konsep ekonomi nasional. Pengertian investasi adalah pembentukan barang modal tetap (*fixed capital formation*) yang terdiri dari: tanah, gedung/konstruksi, mesin dan perlengkapannya, kendaraan, dan barang modal lainnya. Sementara itu, nilai pembentukan modal mencakup:

1. Pembelian barang baru dan barang bekas dari luar negeri,
2. Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan pihak lain,
3. Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan sendiri,

4. Penjualan barang modal bekas.

Total nilai investasi diperoleh dari penjumlahan seluruh pembelian barang modal baru/bekas, pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan oleh pihak lain dan sendiri dikurangi penjualan barang modal bekas.

2.1.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

Secara lebih rinci PMTB terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset nonfinansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

PMTB dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. PMTB menurut jenis barang modal,
2. PMTB menurut lapangan usaha/sektor,
3. PMTB menurut institusi.

PMTB menurut jenis barang modal

PMTB menurut jenis barang modal dapat dibedakan atas:

1. Pembentukan modal berupa bangunan, yaitu: bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, dan bangunan lainnya seperti: jalan raya, instalasi listrik, jaringan komunikasi, bendungan, pelabuhan, dan sebagainya.
2. Pembentukan modal berupa mesin, seperti: mesin pertanian, mesin pertambangan, mesin industri, dan alat perabot serta perlengkapan untuk kantor, hotel, dan restoran.
3. Pembentukan modal berupa alat angkutan seperti: mobil, bus, truk, kapal laut, pesawat, sepeda motor, dan sebagainya.
4. Barang modal lainnya seperti: perluasan hutan; pengembangan/perluasan lahan; penanaman kembali hutan; ternak untuk pembiakan, pemerahan susu atau sebagai alat angkutan; perluasan areal pertambangan; dan sebagainya.

PMTB menurut Lapangan Usaha

Klasifikasi PMTB menurut lapangan usaha adalah sebagai berikut:

1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Pengadaan Listrik & Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor
8. Transportasi & Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum
10. Informasi & Komunikasi
11. Jasa Keuangan & Asuransi
12. Real Estate
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial
17. Jasa lainnya

PMTB menurut Institusi

PMTB menurut institusi dibedakan atas tiga kelompok berikut:

1. Pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah disini adalah pemerintah yang menyelenggarakan *general administration*, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengeluaran PMTB oleh pemerintah misalnya untuk membangun gedung kantor, pembelian mesin-mesin, komputer untuk menyelenggarakan tugas pemerintah sebagai *administration*, termasuk juga bila pemerintah mengeluarkan biaya untuk kepentingan masyarakat yang bersifat infrastruktur, seperti: jalan raya, pembangunan irigasi, dan sebagainya.
2. Korporasi/Perusahaan Swasta termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam kategori ini hanya pengeluaran investasi yang benar-benar dikuasai BUMN/BUMD, tetapi tidak termasuk pengeluaran biaya oleh pemerintah pada butir a. di atas. Kegiatan yang dicakup perusahaan meliputi sektor finansial dan nonfinansial.
3. Rumah tangga dan Lembaga Swasta Nirlaba. Kegiatan membangun rumah baru atau memperbaiki rumah milik sendiri secara besar-besaran dianggap sebagai bagian dari pembentukan modal. Hal ini sesuai dengan keharusan meng-imputasi sewa rumah penduduk (rumah tangga) baik milik sendiri maupun rumah dinas.

2.1.2. Perubahan Inventori

Dalam PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

1. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
2. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material and supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
3. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
4. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
5. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
6. Ternak untuk tujuan dipotong;
7. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2.2. Pengertian Output

Output diartikan sebagai seluruh nilai produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh berbagai sektor produksi. Dengan kata lain, output merupakan “keluaran” atau hasil yang diperoleh dari pendayagunaan seluruh faktor produksi baik berbentuk barang atau jasa seperti: tanah, tenaga kerja, modal dan kewiraswastaan. Dari segi ekonomi nasional, output merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi domestik dalam suatu periode tertentu.

Dari segi perusahaan, output mencakup nilai barang (komoditi) jadi yang dihasilkan selama suatu periode tertentu ditambah nilai perubahan inventori/stok barang (komoditi) yang masih dalam proses. Output yang dimaksud adalah:

1. Barang-barang yang dihasilkan.
2. Tenaga listrik yang dijual.
3. Selisih nilai stok setengah jadi.

Output ini dihitung atas dasar harga produsen, yaitu harga yang diterima oleh produsen pada tingkat transaksi pertama. Karena masih mengandung nilai penyusutan barang modal, output ini masih bersifat bruto. Untuk mendapatkan output neto atas harga pasar, output bruto atas harga pasar harus dikurangi dengan penyusutan barang modal.

Dalam pengertian ICOR, output adalah tambahan produk dari hasil kegiatan ekonomi dalam suatu periode atau nilai-nilai yang merupakan hasil pendayagunaan faktor-faktor produksi. Output ini merupakan seluruh nilai tambah atas dasar biaya faktor produksi yang dihasilkan dari seluruh kegiatan.

2.3. Pengertian Nilai Tambah

Konsep Nilai Tambah berkaitan erat dengan konsep penghitungan output. Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah nilai seluruh balas jasa faktor produksi yang meliputi upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung (neto). Dengan kata lain, nilai tambah adalah suatu tambahan nilai pada nilai input antara yang digunakan dalam proses menghasilkan barang/jasa. Nilai input antara tersebut bertambah karena input antara tersebut telah mengalami proses produksi yang mengubahnya menjadi barang yang nilainya lebih tinggi. Sedangkan input antara mencakup nilai seluruh komoditi yang habis atau dianggap habis dalam suatu proses produksi, seperti: bahan baku, bahan bakar, pemakaian listrik, dan sebagainya. Barang yang digunakan sebagai alat dalam suatu proses produksi dan umurnya kurang dari setahun dan habis dipakai dimasukkan sebagai input antara (bukan barang modal).

Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga pasar dari suatu unit produksi adalah output bruto atas dasar harga produsen dikurangi input antara atas dasar harga pasar. Karena keterbatasan data penyusutan barang modal dan pajak tak langsung, maka pendekatan nilai tambah bruto inilah yang dipakai untuk penghitungan ICOR ini.

2.4. Pengertian ICOR

Dalam rangka mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tertentu, sangat diperlukan adanya perkiraan kebutuhan investasi dengan benar. Model Harold Domar mengaitkan adanya pengaruh tambahan stok kapital terhadap output yang dikenal dengan ICOR. Perhitungan ICOR sangat dibutuhkan dalam menentukan seberapa besar kebutuhan investasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tumbuh dan dengan ICOR dapat dilihat seberapa efisien investasi yang ditanamkan pada periode tertentu.

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) memiliki peranan yang penting dalam teori ekonomi. ICOR atau rasio kenaikan output akibat kenaikan kapital adalah indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk menilai kinerja investasi di suatu negara. Kegunaan lainnya adalah untuk menghitung besarnya investasi yang dibutuhkan agar perekonomian tumbuh dengan laju yang sudah ditetapkan.

ICOR merupakan suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Nilai ICOR diperoleh dari perbandingan antara besarnya tambahan

kapital dengan tambahan output. Karena unit kapital bentuknya berbeda-beda dan beraneka ragam sementara unit output relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal). ICOR dapat merefleksikan besarnya produktifitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Tambahan kapital diperoleh dari investasi.

Hubungan ICOR dengan pertumbuhan ekonomi dikembangkan pertama kali oleh R.F. Harrod dan Evsey Domar. Profesor Evsey Domar, seorang ekonom Amerika Serikat mengembangkan suatu koefisien yang diturunkan dari suatu rumus tentang pertumbuhan ekonomi. Domar mengemukakan teorinya tersebut pertama kali pada tahun 1947 dalam *American Economic Review*, sedangkan Harrod telah mengemukakannya pada tahun 1939 dalam *Economic Journal*. Teori ini sebenarnya dikembangkan oleh kedua ekonom secara sendiri – sendiri, tetapi karena inti teori tersebut sama, maka sekarang dikenal sebagai teori Harrod – Domar (Arsyad, 1988). Koefisien itu mengaitkan pertambahan kapasitas terpasang (*capital*) dengan pertumbuhan ekonomi (*output*).

Teori Harrod – Domar mempunyai beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Perekonomian dalam pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang- barang modal dalam masyarakat digunakan secara penuh.
2. Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Ini berarti dalam analisis dianggap tidak terdapat sektor pemerintah dan sektor luar negeri.
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional. Ini berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
4. Kecenderungan masyarakat untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap. Demikian juga rasio antara modal – output (*capital output ratio = COR*) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capital output ratio = ICOR*) adalah tetap (Arsyad, 1988).

Dalam model pertumbuhan Harrod – Domar mencakup persamaan sebagai berikut (Hess and Ross, 1997):

$$H1) \quad K = vY \quad (2.1)$$

$$H2) \quad L = uY \quad (2.2)$$

$$H3) \quad I = S \quad (2.3)$$

$$H4) \quad S = sY \quad (2.4)$$

$$H5) \quad \Delta L/L = n \quad (2.5)$$

Berdasarkan persamaan (2.1) dan (2.2) dapat dirumuskan persamaan fungsi produksi sebagai berikut:

$$Y = A \min (K/v, L/u) \quad (2.6)$$

keterangan:

Y = output

A = teknologi

K = stok kapital

L = jumlah tenaga kerja

I = investasi

S = jumlah tabungan

v = rasio kapital-output

u = rasio tenaga kerja-output

s = tingkat tabungan

n = tingkat pertumbuhan tenaga kerja alami

Dengan asumsi $A = 1$, maka untuk memperoleh perubahan output sebesar ΔY diperlukan perubahan input sebagai berikut:

$$H1') \Delta K = v\Delta Y \quad (2.7)$$

$$H2') \Delta L = u\Delta Y \quad (2.8)$$

Dengan membagi persamaan (2.7) dengan (2.1) dan persamaan (2.8) dengan (2.2) akan diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\Delta K/K = v\Delta Y/vY = \Delta Y/Y \quad (2.9)$$

$$\Delta L/L = u\Delta Y/uY = \Delta Y/Y \quad (2.10)$$

keterangan:

$\Delta Y/Y$ = laju pertumbuhan output

$\Delta K/K$ = laju pertumbuhan kapital

$\Delta L/L$ = laju pertumbuhan tenaga kerja

Dalam perekonomian sederhana tanpa campur tangan pemerintah dan perdagangan luar negeri, pada kondisi keseimbangan pasar barang maka $I = S$. Tabungan diperoleh dari output yang tidak dikonsumsi. Dengan demikian, Investasi adalah bagian output yang tidak dikonsumsi.

Dari persamaan (2.3), (2.4), dan (2.7) dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\Delta K = I = S = sY \quad (2.11)$$

$$v\Delta Y = \Delta K = I = S = sY \quad (2.12)$$

$$v\Delta Y = sY \quad (2.13)$$

$$v\Delta Y/vY = sY/vY \quad (2.14)$$

$$\Delta Y/Y = s/v \quad (2.15)$$

Beberapa kelemahan dari Teori Harrod – Domar adalah sebagai berikut:

1. Anggapan bahwa MPS dan ICOR konstan adalah anggapan yang terlalu kaku mengingat dalam jangka panjang mungkin sekali kedua variabel tersebut berubah.
2. Teori Harrod – Domar beranggapan proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tetap. Anggapan ini tidak dapat dipertahankan mengingat pada kenyataannya hubungan antara tenaga kerja dan modal tidak selalu dalam proporsi yang tetap.
3. Model Harrod – Domar mengabaikan perubahan-perubahan harga pada umumnya. Padahal perubahan harga selalu terjadi di setiap waktu dan sebaliknya dapat mengendalikan situasi ekonomi yang tidak stabil.
4. Asumsi bahwa suku bunga tidak berubah adalah tidak relevan dengan analisis yang bersangkutan. Suku bunga dapat berubah dan pada akhirnya akan mempengaruhi investasi.

Pada dasarnya teori tentang ICOR dilandasi oleh dua macam konsep yaitu:

1. Rasio Modal – Output atau *Capital Output Ratio* (COR) atau sering disebut sebagai *Average Capital Output Ratio* (ACOR), yaitu perbandingan antara modal yang digunakan dengan output yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. COR atau ACOR ini bersifat statis karena hanya menunjukkan besaran yang menggambarkan perbandingan modal dan output.
2. Rasio Modal – Output Marginal atau *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR), yaitu suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan modal (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output baik secara fisik maupun secara nilai (uang). Konsep ICOR ini lebih bersifat dinamis karena menunjukkan perubahan/penambahan output sebagai akibat langsung dari penambahan modal.

Dari pengertian pada butir (2) di atas, maka ICOR bisa diformulasikan sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} \quad (2.16)$$

keterangan:

ΔK = investasi, atau penambahan barang modal baru/kapasitas terpasang

ΔY = pertambahan output

Sebagai ilustrasi, jika diketahui bahwa koefisien ICOR di suatu daerah sebesar 4. Artinya untuk meningkatkan output satu unit diperlukan investasi sebesar 4 unit. Jika output di daerah itu pada tahun sebelumnya sebesar 4 triliun rupiah, maka agar output pada tahun yang akan datang tumbuh 10 persen, atau bertambah sebesar 0,4 triliun rupiah, dibutuhkan investasi sebesar $4 \times \text{Rp. } 0,4 \text{ triliun} = 1,6 \text{ triliun rupiah}$.

Dalam perkembangannya, data yang digunakan untuk menghitung ICOR bukan lagi hanya penambahan barang modal baru atau perubahan stok modal, melainkan Investasi (I) yang ditanam baik oleh swasta maupun pemerintah sehingga rumusan ICOR dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y} \quad (2.17)$$

keterangan:

I = Investasi

ΔY = perubahan output

Peningkatan output tidak hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi seperti: pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi, dan kemampuan kewiraswastaan. Dengan demikian, untuk melihat peranan investasi terhadap output berdasarkan konsep ICOR, maka peranan faktor-faktor selain investasi diasumsikan konstan (*ceteris paribus*).

2.5. Metode Penghitungan ICOR

Ada dua metode penghitungan ICOR yang digunakan, yaitu metode standar dan metode akumulasi investasi. Penghitungan ICOR periode 2014-2018 dibatasi hanya dengan menggunakan metode standar lag 0, lag 1, dan lag 2, sedangkan untuk metode akumulasi hanya lag 0 saja.

2.5.1. Metode Standar

Secara matematis rumus yang digunakan untuk menghitung ICOR adalah:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} \quad (2.18)$$

keterangan:

ΔK = penambahan kapital/barang modal baru/kapasitas terpasang

ΔY = penambahan output

Dalam praktek, data yang diperoleh bukan penambahan barang modal baru atau penambahan kapasitas terpasang, melainkan besarnya realisasi nilai investasi yang ditanam baik oleh Pemerintah maupun Swasta. Sehingga dengan mengasumsikan $\Delta K = I$ (investasi), maka rumus (2.18) dapat dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y} \quad (2.19)$$

Rumus (2.19) ini disebut dengan Gross ICOR, yaitu suatu rasio yang menunjukkan besarnya tambahan unit kapital yang diperlukan untuk memperoleh tambahan satu unit output pada suatu periode tertentu. Dalam penerapannya rumus Gross ICOR ini lebih sering dipakai karena data yang digunakan tersedia relatif lebih lengkap.

Dalam beberapa hal untuk kasus-kasus tertentu, investasi yang ditanamkan pada suatu tahun akan langsung menghasilkan tambahan output pada tahun itu juga, sehingga rumus (2.19) di atas dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{I_t}{(Y_t - Y_{t-1})} \quad (2.20)$$

keterangan:

I_t = investasi pada tahun ke-t

Y_t = output pada tahun ke-t

Y_{t-1} = output pada tahun t-1

Rumus (2.20) di atas dapat diartikan bahwa investasi yang ditanamkan pada tahun ke-t akan menimbulkan output pada tahun t itu juga.

Pada metode standar, langkah penghitungan dilakukan terlebih dahulu dengan mencari ICOR pada masing-masing tahun untuk periode waktu t_1 s.d t_n , sehingga akan didapatkan nilai ICOR sebanyak n buah. ICOR yang dianggap dapat mewakili untuk periode waktu tersebut (t_1 s.d t_n) diperoleh dengan jalan membagi antara jumlah nilai ICOR selama periode waktu t_1 s.d t_n dengan jumlah tahun (n), atau dengan mencari rata-rata nilai ICOR selama periode t_1 sampai dengan t_n .

Prinsip dari penghitungan ICOR metode standar ini adalah rata-rata sederhana dan penulisannya secara matematis sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{1}{n} \sum \frac{I_t}{(Y_t - Y_{t-1})} \quad (2.21)$$

Kelemahan dari penggunaan rata-rata sederhana ini adalah jika terjadi suatu koefisien ICOR yang ekstrim pada tahun-tahun tertentu, maka koefisien ini berpengaruh pada nilai rata-rata koefisien ICOR dalam periode waktu penghitungan. Namun demikian, penggunaan metode standar ini mempunyai daya tarik lain yaitu mampu mencerminkan inefficiency yang sering terjadi dalam praktek.

2.5.2. Metode Akumulasi Investasi

Pendekatan penghitungan ICOR dengan metode akumulasi berdasarkan suatu anggapan bahwa timbulnya kenaikan output selama periode waktu t disebabkan karena adanya akumulasi investasi selama periode waktu t.

Perumusan ICOR dengan metode ini adalah rasio antara akumulasi investasi terhadap akumulasi peningkatan output selama periode waktu t1 sampai tn yang secara matematis dituliskan sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\sum I_t}{\sum (Y_t - Y_{t-1})} \quad (2.22)$$

Kelebihan dari metode akumulasi adalah, dalam penerapannya metode ini terkandung prinsip rata-rata tertimbang. Dengan digunakannya rata-rata tertimbang, maka koefisien ICOR ekstrim yang terjadi pada tahun-tahun tertentu bisa dihindari. Tetapi, metode akumulasi ini tidak memperhitungkan kapasitas terpasang yang berlebih dan tidak dimanfaatkan secara penuh. Dengan kata lain, metode akumulasi relatif kurang mampu mencerminkan *inefficiency*, yang memang terjadi dalam praktek.

2.5.3. Time lag Investasi

Biasanya investasi yang ditanam pada tahun tertentu tidak secara langsung memberikan hasil tambahan output pada tahun itu juga, tetapi memerlukan waktu beberapa tahun lagi. Rentang waktu yang diperlukan agar penanaman investasi dapat menghasilkan tambahan output disebut *time lag* (lag).

Jika investasi yang ditanam pada tahun ke- t baru menimbulkan kenaikan output setelah s tahun, maka rumus (4) di atas (ICOR metode standar) dengan adanya faktor *time lag* dapat dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{\sum I_t}{\sum (Y_t - Y_{t-1})} \quad (2.22)$$

keterangan :

Time lag = 0, 1, 2, 3, 4, dst.

s = lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil/output terhitung sejak penanaman investasi.

2.5.4. Koefisien ICOR Negatif

Koefisien ICOR negatif dapat terjadi jika output pada suatu waktu tertentu lebih kecil dari pada tahun sebelumnya. Penurunan output terjadi jika ada sebagian barang modal dijual, rusak atau tidak diaktifkan karena alasan tertentu. Walaupun mungkin ada penambahan barang modal baru, tetapi barang modal baru tersebut sementara belum berproduksi atau telah berproduksi tetapi output yang dihasilkan relatif sangat kecil dibandingkan dengan output tahun sebelumnya. Sehingga selisih output antara tahun ditanamkannya investasi dengan tahun sebelumnya bernilai negatif. Pada gilirannya koefisien ICOR-pun menjadi negatif. Dengan demikian, penanaman barang modal baru belum menghasilkan output secara optimal, atau bisa dikatakan investasi yang ditanamkan belum/tidak efisien pada saat itu. Tetapi jika ada penambahan/penggantian barang modal, maka tidak bisa dikatakan bahwa telah terjadi *inefficiency*. Namun demikian secara makro keadaan yang disebutkan terakhir ini jarang terjadi.

2.5.5. Koefisien ICOR yang Besar dan Positif

Koefisien ICOR yang relatif besar terjadi jika nilai investasi yang ditanamkan pada tahun tertentu relatif besar, sedangkan output yang dihasilkan lebih besar tetapi hampir sama dengan output pada tahun sebelumnya, atau tambahan output yang dihasilkan relatif kecil. Koefisien ICOR yang besar juga bisa terjadi pada lapangan usaha yang bersifat *capital intensive*.

2.5.6. Asumsi Dasar

Walaupun pertambahan output sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi, dalam penghitungan ICOR

ini digunakan asumsi bahwa tidak ada faktor lain yang mempengaruhi output selain investasi, dengan kata lain faktor-faktor lain di luar investasi dianggap konstan (*ceteris paribus*). Jadi perubahan/kenaikan output hanya disebabkan oleh adanya perubahan kapital/investasi.

Output dari suatu kegiatan ekonomi merupakan input antara untuk kegiatan ekonomi lainnya, sehingga jika digunakan konsep output dalam penghitungan ICOR dirasakan kurang tepat karena akan terjadi penghitungan ganda (*double counting*), yaitu output dari suatu perusahaan akan dihitung kembali sebagai input perusahaan lainnya. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam penghitungan ICOR digunakan konsep Nilai Tambah.

Konsep Nilai Tambah (*Value Added*) yang digunakan dalam penghitungan ICOR ini selanjutnya dinamakan dengan istilah ICVAR (*Incremental Capital Value Added Ratio*). Meskipun demikian, ukuran ICVAR ini juga digunakan untuk memprediksi suatu rasio investasi terhadap output menurut lapangan usaha, dan bukannya terhadap nilai tambah semata.

ICOR yang disajikan telah memperhitungkan perubahan inventori (selisih stok) baik bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Dalam pendekatan mikro, umumnya perusahaan diasumsikan tidak melakukan penimbunan atau akumulasi stok barang untuk kelancaran produksi. Dalam pendekatan makro, perusahaan dianggap telah membuat keputusan akumulasi stok dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang akan datang. Misalnya, dalam hal ada kecenderungan bahan baku akan melonjak, perusahaan dapat mengambil keputusan melakukan akumulasi stok bahan baku dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi mendatang. Penghitungan ICOR di sini, menggunakan pendekatan makro, dengan menganggap perubahan inventori/stok sebagai bagian dari pembentukan modal (investasi).

Beberapa asumsi lainnya yang dipakai dalam penyusunan ICOR ini adalah:

1. Perubahan output semata-mata hanya disebabkan oleh perubahan kapital/adanya investasi.
2. Faktor-faktor lain di luar investasi, seperti pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi dan kemampuan wiraswasta diasumsikan konstan.

Dengan asumsi-asumsi di atas angka ICOR mempunyai keterbatasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak mampu menjelaskan penyebab pertumbuhan ekonomi, apakah dipengaruhi oleh pertumbuhan faktor produksi atau tingkat produktivitasnya.
2. Tidak mampu menjelaskan besaran peranan faktor di luar perubahan kapital dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi.
3. Proses penghitungan ICOR yang optimal sebaiknya menggunakan periode referensi yang panjang misalnya 10 tahun ke atas, karena pembentukan modal bersifat akumulatif. Dalam kajian ini hanya dibatasi selama periode 2012-2016.

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://pulsel.bps.go.id>



BAB III

**PERKEMBANGAN
PEREKONOMIAN
WILAYAH SELATAN-
SELATAN**

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://pulsel.bps.go.id>

BAB III

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN WILAYAH SELATAN-SELATAN

3.1. Tinjauan dari sisi PDRB Lapangan Usaha

Wilayah Selatan-Selatan merupakan satu dari 5 pengelompokan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan satuan wilayah pembangunan. Wilayah ini secara geografis terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi dan terdiri dari 5 (lima) kabupaten atau wilayah administrasi yaitu Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, dan Sinjai. Adapun struktur perekonomian wilayah Selatan-Selatan didominasi oleh 3 (tiga) kategori/lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; serta lapangan usaha Konstruksi. Struktur perekonomian tahun 2018 di wilayah Selatan-Selatan didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 41,20 persen. Nilai persentase ini dihitung berdasarkan distribusi nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB adhb) tahun 2018 dari total 5 (lima) kabupaten yang termasuk dalam wilayah Selatan-Selatan dan terbagi dalam 17 kategori sektor lapangan usaha. Adapun masing-masing kabupaten yang termasuk dalam wilayah ini, struktur ekonominya juga didominasi oleh 3 kategori/lapangan usaha tersebut.

Pada tahun 2018, kategori/lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang sebesar 45,11 persen perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar, 38,68 persen di Kabupaten Bulukumba, 30,39 persen di Kabupaten Bantaeng, 46,69 persen di Kabupaten Jeneponto, dan 45,24 persen di Kabupaten Sinjai. Kategori/lapangan usaha terbesar kedua dalam struktur ekonomi di wilayah Selatan-Selatan adalah kategori/lapangan usaha Konstruksi yang menyumbang sebesar 14 persen terhadap perekonomian wilayah Selatan-Selatan. Kategori Konstruksi menyumbang sebesar 21,57 persen perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar, 10,19 persen di Kabupaten Bulukumba, 18,08 persen di Kabupaten Bantaeng, 12,24 persen di Kabupaten Jeneponto, dan 12,92 persen di Kabupaten Sinjai. Selanjutnya kategori/lapangan usaha terbesar ketiga di wilayah Selatan-Selatan adalah kategori/lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menyumbang sebesar 13,50 persen terhadap perekonomian wilayah Selatan-Selatan. Kategori ini hanya menyumbang sebesar 7,53 persen pada perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar. Sedangkan di empat kabupaten lainnya, kategori/lapangan usaha ini masih mampu memberikan kontribusi lebih dari 10 persen yaitu 16,41 persen di Kabupaten Bulukumba (lebih besar kontribusinya dibanding kategori/lapangan usaha Konstruksi), 14,85 persen di Kabupaten Bantaeng, 12,94 persen di Kabupaten Jeneponto, dan 12,53 persen di Kabupaten Sinjai.

Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir (2014-2018) konsisten menunjukkan peningkatan yang positif baik itu atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (tahun dasar 2010). Nilai PDRB ADHB tahun 2014 di Sulawesi Selatan sebesar 298,03 triliun rupiah, dan pada tahun 2018 Sulawesi Selatan mampu menghasilkan nilai PDRB ADHB sebesar 462,34 triliun rupiah. Bila mengabaikan pengaruh inflasi dan menggunakan harga tahun dasar 2010 maka dapat pula dikatakan bahwa peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) di Sulawesi Selatan atau bisa disebut juga sebagai pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan pada tahun 2014-2018 berturut-turut adalah 7,54 persen; 7,19 persen; 7,42 persen; 7,21 persen; 7,06 persen.

Walaupun sempat mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016, ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun-tahun selanjutnya secara konsisten tumbuh positif namun terus mengalami perlambatan. Hal ini karena adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kategori/lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mana sektor ini mempunyai peranan paling besar dibanding kategori/lapangan usaha lainnya dalam membentuk nilai PDRB di Sulawesi Selatan. Selain itu adanya perlambatan pertumbuhan yang cukup tajam pada kategori/lapangan usaha Industri Pengolahan juga turut berperan dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam 2 tahun belakangan ini (2017 dan 2018). Adapun nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK wilayah Selatan-Selatan tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 3.1 dan Tabel 3.2.

Tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Wilayah Selatan-Selatan Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

Kabupaten	2014	2015	2016	2017*	2018**
Kep. Selayar	3.494.103,60	4.148.368,75	4.666.086,03	5.223.199,38	5.850.862,50
Bulukumba	8.374.049,09	9.568.396,97	10.769.938,29	12.068.741,55	13.193.578,38
Bantaeng	4.963.797,11	5.579.335,48	6.297.397,01	6.942.456,00	7.765.065,61
Jeneponto	6.155.880,02	7.001.194,66	7.849.191,66	8.614.595,11	9.413.976,90
Sinjai	6.484.191,29	7.517.873,68	8.294.879,43	9.167.999,86	10.226.796,98
Selatan-Selatan	29.472.021,11	33.815.169,55	37.877.492,41	42.016.991,90	46.450.280,38
Sulawesi Selatan	298.033.804,83	340.390.214,27	377.108.906,54	415.744.888,98	462.341.955,42

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 3.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Wilayah Selatan-Selatan Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

Kabupaten	2014	2015	2016	2017*	2018**
Kep. Selayar	2.503.349,35	2.724.398,75	2.924.716,09	3.147.388,58	3.423.434,56
Bulukumba	6.413.698,92	6.774.321,27	7.232.838,24	7.730.913,32	8.120.981,32
Bantaeng	3.819.275,75	4.073.059,72	4.374.214,69	4.694.158,30	5.073.380,93
Jeneponto	4.773.643,60	5.085.915,52	5.508.828,17	5.963.562,33	6.339.362,04
Sinjai	5.035.299,46	5.415.380,09	5.799.305,71	6.218.639,84	6.684.166,00
Selatan-Selatan	22.545.267,09	24.073.075,35	25.839.902,90	27.754.662,37	29.641.324,85
Sulawesi Selatan	233.988.050,61	250.802.993,05	269.401.313,45	288.814.171,11	309.243.627,68

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Wilayah Selatan-Selatan mampu menghasilkan nilai PDRB ADHB di tahun 2018 sebesar 46,45 triliun rupiah atau menyumbang sekitar 10 persen terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa kategori/lapangan usaha di wilayah Selatan-Selatan yang memiliki kontribusi lebih dari 10 persen terhadap masing-masing kategori/lapangan usaha dalam perekonomian Sulawesi Selatan antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sekitar 18,29 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 16,01 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,61 persen, dan Kontruksi sebesar 10,40 persen. Sedangkan untuk kategori lainnya, wilayah Selatan-Selatan hanya mampu berkontribusi kurang dari 10 persen terhadap masing-masing kategori. Separuh dari nilai PDRB di wilayah Selatan-Selatan berasal dari kontribusi 2 kabupaten yaitu Bulukumba sebesar 28,40 persen dan Sinjai sebesar 22,02 persen sedangkan Jeneponto, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar secara berturut-turut menyumbang sebesar 20,27 persen, 16,72 persen, dan 12,60 persen. Selama 5 tahun belakangan, besarnya kontribusi masing-masing kabupaten dalam pembentukan nilai PDRB di wilayah Selatan-Selatan tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan peringkat yang tetap. Dari 5 kabupaten yang ada, hanya Kepulauan Selayar yang kontribusinya dari tahun ke tahun secara konsisten terus mengalami peningkatan walaupun masih menjadi kabupaten dengan kontribusi terkecil dalam pembentukan nilai PDRB di wilayah Selatan-Selatan. Besarnya kontribusi masing-masing kabupaten di wilayah Selatan-Selatan tahun 2014 hingga tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Distribusi PDRB Wilayah Selatan-selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten, 2014-2018 (%)

Kabupaten	2014	2015	2016	2017*	2018**
Kep. Selayar	11,86	12,27	12,32	12,43	12,60
Bulukumba	28,41	28,30	28,43	28,72	28,40
Bantaeng	16,84	16,50	16,63	16,52	16,72
Jeneponto	20,89	20,70	20,72	20,50	20,27
Sinjai	22,00	22,23	21,90	21,82	22,02
Selatan-Selatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

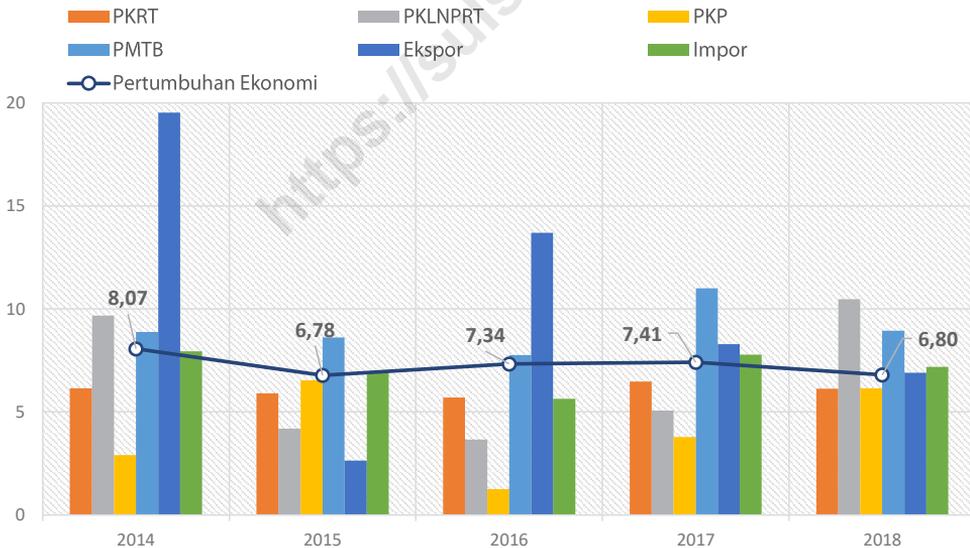
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.2 Tinjauan dari Sisi PDRB Pengeluaran

Selama kurun waktu 5 tahun (2014-2018) perkembangan ekonomi di wilayah Selatan-Selatan dari sisi pengeluaran atau dapat dijelaskan sebagai besarnya nilai barang dan jasa (output) yang dihasilkan di wilayah Selatan-Selatan dan digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat di wilayah ini menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif namun mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2018. Tercatat pada tahun 2014 perekonomian di wilayah Selatan-Selatan tumbuh sebesar 8,07 persen dan di pada tahun 2018 tumbuh positif sebesar 6,08 persen namun melambat dibandingkan dengan tahun 2017 yang tumbuh sebesar 7,41persen. Pertumbuhan yang fluktuatif dan cenderung melambat juga terjadi pada masing-masing komponen pengeluaran. Perekonomian wilayah Selatan-Selatan dari sisi pengeluaran paling besar merupakan peranan dari komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 58,62 persen pada tahun 2018, lalu disusul oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 37,88 persen, selanjutnya berasal dari Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 12,09 persen. Sedangkan komponen sisanya memiliki kontribusi kurang dari 10 persen. Besar pertumbuhan setiap komponen pengeluaran wilayah Selatan-Selatan tahun 2014 hingga tahun 2018 dapat dilihat pada Grafik 3.1.

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Selatan-Selatan Tahun 2014-2018





BAB IV

PERKEMBANGAN INVESTASI, ICOR, DAN KETIMPANGAN INVESTASI WILAYAH SELATAN-SELATAN

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://pulsel.bps.go.id>

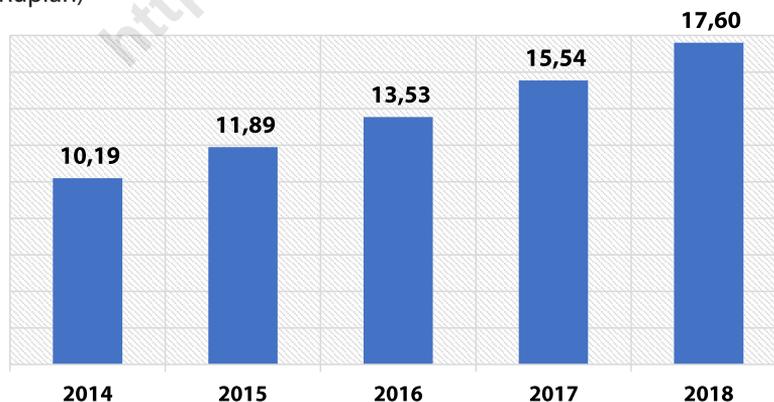
BAB IV

PERKEMBANGAN INVESTASI, ICOR, DAN KETIMPANGAN INVESTASI WILAYAH SELATAN-SELATAN

4.1. Perkembangan Investasi

Penyusunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) wilayah Selatan-Selatan menggunakan asumsi bahwa nilai investasi sama dengan nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Perkembangan nilai investasi di wilayah Selatan-Selatan selama 5 tahun terakhir (2014-2018) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 nilai investasi yang terbentuk di wilayah Selatan-Selatan mencapai 10,19 triliun rupiah, kemudian meningkat menjadi 17,60 triliun rupiah pada tahun 2018. Besarnya nilai investasi selama tahun 2014 hingga tahun 2018 dapat dilihat pada grafik 4.1. Nilai investasi yang terus meningkat setiap tahunnya juga sejalan dengan besar kontribusi investasi wilayah Selatan-Selatan terhadap total investasi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2014 wilayah Selatan-Selatan berkontribusi sebesar 9,31 persen dan kontribusinya meningkat pada tahun 2018 menjadi 9,67 persen terhadap total investasi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 4.1 Perkembangan Investasi di Wilayah Selatan-Selatan Tahun 2014-2018 (Triliun Rupiah)

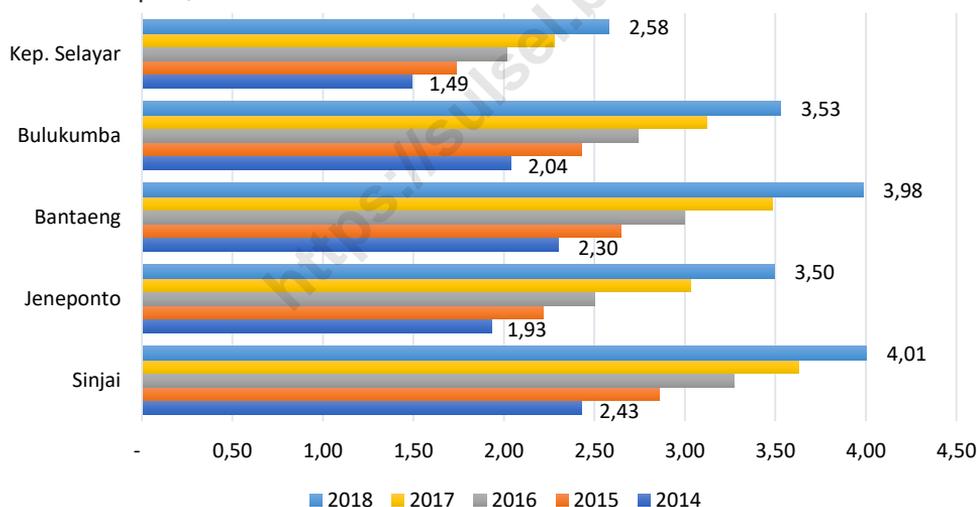


5 (lima) kabupaten yang termasuk dalam satuan wilayah pembangunan Selatan-Selatan memiliki nilai investasi yang cenderung naik setiap tahunnya. Kabupaten Sinjai secara konsisten selama 5 tahun terakhir menjadi kabupaten dengan nilai investasi tertinggi, meningkat dari 2,43 triliun rupiah di tahun 2014 menjadi 4,01 triliun rupiah di tahun 2018. Sedangkan Kabupaten Bulukumba yang memiliki kontribusi perekonomian tertinggi di wilayah Selatan-Selatan memiliki nilai investasi sebesar 2,04 triliun rupiah di tahun 2014 meningkat menjadi 3,12 triliun rupiah di tahun 2018. Sedangkan di Kabupaten

Jeneponto, terjadi peningkatan investasi yang cukup signifikan di tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2014, nilai investasi Kabupaten Jeneponto masih kurang dari 2 triliun rupiah, sedangkan pada 2 tahun terakhir (2017-2018) nilai investasinya meningkat menjadi lebih 3 triliun rupiah. Peningkatan investasi yang cukup signifikan di Kabupaten Jeneponto tahun 2017-2018 dikarenakan adanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang nilai investasinya cukup besar, sehingga mendorong kenaikan investasi secara keseluruhan di Kabupaten Jeneponto.

Demikian juga di Kabupaten Bantaeng, selama kurun waktu 2014-2018 terjadi peningkatan nilai investasi dari 2,30 triliun rupiah di tahun 2014 menjadi 3,98 triliun rupiah di tahun 2018. Sedangkan di Kabupaten Kepulauan Selayar bila dibandingkan dengan 4 (empat) kabupaten yang lain memiliki nilai investasi yang paling kecil. Selama 5 tahun terakhir nilai investasi yang terbentuk di Kabupaten Kepulauan Selayar kurang dari 3 triliun rupiah. Perkembangan nilai investasi masing-masing kabupten di Wilayah Selatan-Selatan dapat dilihat pada Grafik 4.2.

Gambar 4.2 Perkembangan Nilai Investasi Menurut Kabupaten Tahun 2014-2018 (Triliun Rupiah)



Tabel 4.1 Distribusi Investasi Wilayah Selatan-Selatan berdasarkan Kabupaten Tahun 2014-2018

Kabupaten	2014	2015	2016	2017*	2018**
Kep. Selayar	14,61	14,60	14,89	14,67	14,66
Bulukumba	19,99	20,43	20,28	20,10	20,06
Bantaeng	22,57	22,26	22,16	22,40	22,64
Jeneponto	18,98	18,67	18,48	19,50	19,87
Sinjai	23,85	24,05	24,19	23,34	22,76
Selatan-Selatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Total nilai investasi total 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 mencapai Rp 174,08 triliun rupiah. Dari nilai tersebut wilayah Selatan-Selatan memiliki kontribusi sebesar 9,67 persen atau sebesar 17,60 triliun rupiah. Adapun besar kontribusi masing-masing kabupaten terhadap nilai investasi di wilayah Selatan-Selatan sangat berbeda dengan besar kontribusi masing-masing kabupaten terhadap nilai total PDRB untuk wilayah Selatan-Selatan. 65,47 persen dari nilai investasi di wilayah Selatan-Selatan berasal dari Kabupaten Sinjai, Bantaeng, dan Bulukumba dengan besar kontribusi berturut-turut adalah 22,76 persen; 22,64 persen; 20,06 persen. Sedangkan untuk Jeneponto dan Kepulauan Selayar memiliki kontribusi masing-masing sebesar 19,87 persen dan 14,66 persen. Kontribusi masing-masing kabupaten terhadap wilayah Selatan-Selatan selama tahun 2014 hingga 2018 secara lengkap terdapat pada Tabel 4.1.

4.2 ICOR 2014-2018

Metode akumulasi dan metode standar yang digunakan untuk menghitung nilai koefisien ICOR wilayah Selatan-Selatan periode 2014-2018 untuk lag 0, lag 1, dan lag 2 menunjukkan hasil yang semakin kecil pada lag yang semakin besar yang dapat dilihat pada tabel 4.2. Hal ini berarti besarnya nilai investasi yang diperlukan untuk meningkatkan output menentukan kapan investasi tersebut dapat menghasilkan output tambahan yang diinginkan, bisa dalam periode tahun yang sama saat menanamkan investasi ataupun dalam 1 atau 2 tahun kedepan, efek dari investasi baru bisa didapatkan. Koefisien ICOR lag 0 di wilayah Selatan-Selatan sebesar 5,39 memberikan informasi bahwa dibutuhkan penambahan investasi sebesar 5,39 unit apabila ingin meningkatkan 1 unit output pada kurun waktu (tahun) yang sama, atau dengan kata lain untuk meningkatkan PDRB (ADHK) sebesar 1 miliar rupiah maka diperlukan investasi tambahan sebesar 5,39 miliar rupiah pada tahun yang sama. Sedangkan koefisien ICOR lag 1 dan lag 2 menunjukkan koefisien sebesar 5,09 dan 4,64 yang berarti diperlukan investasi tambahan sebesar 5,09 miliar rupiah untuk memperoleh tambahan output senilai 1 miliar rupiah pada 1 tahun setelahnya atau diperlukan tambahan investasi sebesar 4,64 miliar rupiah untuk memperoleh tambahan output senilai 1 miliar rupiah pada 2 tahun setelahnya. Perhitungan ICOR menggunakan

Tabel 4.2 Nilai Koefisien ICOR Tahun 2014-2018

Tahun	Metode Akumulasi			Metode Standar		
	Lag 0	Lag 1	Lag 2	Lag 0	Lag 1	Lag 2
Selayar	5,92	5,54	5,24	5,94	5,58	5,29
Bulukumba	4,24	4,22	3,85	4,32	4,27	3,90
Bantaeng	6,94	6,52	5,84	6,97	6,57	5,86
Jeneponto	4,75	4,34	3,80	4,78	4,41	3,84
Sinjai	5,80	5,37	5,03	5,81	5,37	5,03
Selatan-Selatan	5,39	5,09	4,64	5,39	5,09	4,64

metode standar maupun akumulasi untuk wilayah Selatan-Selatan menunjukkan hasil yang sama baik pada lag 0, lag 1, maupun lag 2 yang berarti tidak terjadi fluktuasi kondisi ekonomi yang ekstrim selama periode tahun 2014 hingga 2018 di wilayah tersebut.

Perhitungan nilai koefisien ICOR untuk masing-masing kabupaten dengan metode akumulasi maupun standar memberikan hasil cukup berbeda kecuali pada Kabupaten Sinjai yang memiliki nilai koefisien yang sama pada lag 1 dan lag 2. Bila di rata-rata perbedaan nilai koefisien metode standar sekitar 0,04 kali lebih besar dari nilai koefisien dengan metode akumulasi. Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki kontribusi terkecil terhadap perekonomian di wilayah Selatan-Selatan memiliki nilai koefisien ICOR metode standar berturut-turut untuk lag 0; lag1; dan lag 2 sebesar 5,92; 5,54; dan 5,24. Sedangkan dengan menggunakan metode standar nilai koefisiennya lebih besar, untuk lag 0 sebesar 5,94, lag 1 sebesar 5,58 dan lag 2 sebesar 5,29. Bila disimpulkan berdasarkan kedua metode tersebut, untuk peningkatan tambahan output sebesar 1 miliar rupiah, pada tahun yang sama Kabupaten Selayar membutuhkan penanaman investasi pada kisaran 5,92 - 5,94 miliar rupiah. Sedangkan penambahan investasi pada kisaran 5,24 – 5,29 miliar rupiah akan memberikan efek tambahan output sebesar 1 miliar rupiah setelah 2 tahun berikutnya.

Hasil yang berbeda ditunjukkan pada Kabupaten Bulukumba yang koefisien ICOR-nya lebih kecil daripada koefisien ICOR Kabupaten Kepulauan Selayar. Kabupaten Bulukumba memerlukan penanaman investasi pada kisaran 3,85 miliar rupiah hingga 4,32 miliar rupiah untuk meningkatkan output sebesar 1 miliar rupiah dengan rincian sebagai berikut: untuk tambahan output di tahun yang sama maka diperlukan tambahan nilai investasi sebesar 4,24 – 4,32 miliar rupiah; untuk tambahan output di 1 tahun berikutnya maka diperlukan tambahan nilai investasi sebesar 4,22 – 4,27 miliar rupiah; sedangkan untuk tambahan output pada 2 tahun berikutnya hanya diperlukan penanaman investasi kisaran 3,85 – 3,90 miliar rupiah.

Koefisien ICOR di Kabupaten Bantaeng menunjukkan kebutuhan investasi yang paling tinggi diantara 4 kabupaten lainnya, bahkan lebih tinggi juga bila dibandingkan dengan koefisien ICOR wilayah Selatan-Selatan. Bila diperinci kembali, perlu penanaman investasi pada kisaran 6,94 – 6,97 miliar rupiah untuk memperoleh tambahan output sebesar 1 miliar rupiah pada tahun yang sama. Sedangkan untuk memperoleh tambahan output 1 miliar rupiah pada 1 tahun dan 2 tahun berikutnya diperlukan penanaman investasi berturut-turut sebesar 6,52 - 6,57 miliar rupiah dan 5,84 – 5,86 miliar rupiah. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada Kabupaten Jeneponto yang koefisien ICOR-nya lebih kecil daripada koefisien ICOR Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Jeneponto memerlukan penanaman investasi pada kisaran 3,80 miliar rupiah hingga 4,78 miliar rupiah untuk memperoleh tambahan output sebesar 1 miliar rupiah dengan rincian, untuk tambahan output di tahun yang sama maka diperlukan tambahan nilai investasi sebesar 4,75 – 4,78 miliar rupiah; untuk tambahan output di 1 tahun berikutnya maka diperlukan tambahan nilai investasi sebesar 4,34 – 4,41 miliar rupiah; sedangkan untuk tambahan output pada 2 tahun berikutnya hanya diperlukan penanaman investasi kisaran 3,80 – 3,84 miliar rupiah.

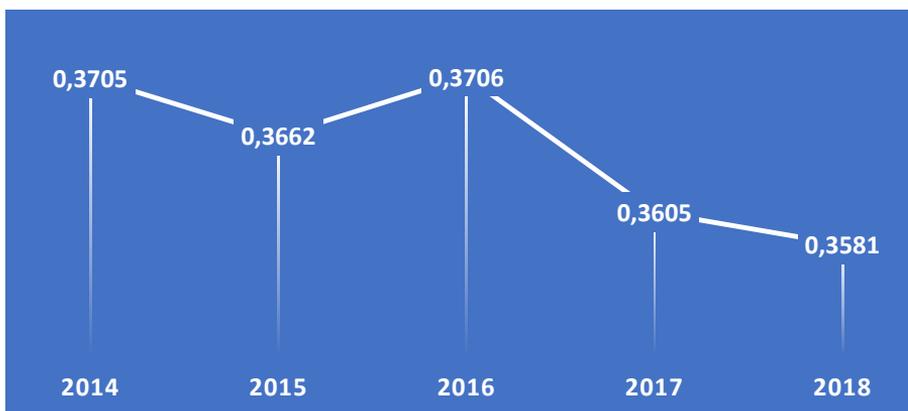
Dengan demikian Kabupaten Jeneponto membutuhkan nilai penanaman investasi paling kecil diantara kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Selatan-Selatan. Selanjutnya untuk koefisien ICOR di Kabupaten Sinjai sama nilainya pada lag 1 dan lag 2 baik menggunakan metode akumulasi maupun menggunakan metode standar. Perbedaan terjadi hanya pada lag 0 yang mana untuk memperoleh tambahan output sebesar 1 miliar rupiah di tahun yang sama maka Kabupaten Sinjai memerlukan penanaman investasi sebesar 5,80 miliar rupiah (metode akumulasi) atau 5,81 (metode standar). Adapun untuk memperoleh tambahan output pada 1 dan 2 tahun berikutnya maka berturut-turut diperlukan penanaman investasi sebesar 5,37 miliar rupiah dan 5,03 miliar rupiah.

4.3 Ketimpangan Investasi Wilayah

Ukuran ketimpangan investasi wilayah melalui perhitungan Indeks Williamson dimaksudkan untuk menganalisis kondisi kesenjangan investasi yang terbentuk antar kabupaten di wilayah Selatan-Selatan. Dasar perhitungannya menggunakan PDRB Pengeluaran komponen PMTB (Investasi) tahun 2014-2018 dan jumlah penduduk masing-masing kabupaten di wilayah tersebut. Nilai Indeks Williamson berkisar antara 0 – 1.

Selama periode 2014-2018, indeks ketimpangan investasi di wilayah Selatan-Selatan berada di level 0,3581 - 0,3706, yang artinya ketimpangan investasi yang terjadi masuk kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi nilai investasi yang terdapat pada masing-masing kabupaten di wilayah Selatan-Selatan belum merata. Dengan kata lain, besar nilai investasi kabupaten yang tergolong rendah jauh nominalnya dibanding dengan nilai investasi kabupaten yang tergolong tinggi. Meskipun ketimpangan investasi yang terjadi di wilayah Selatan-Selatan masih masuk kategori sedang, namun jika dilihat tren 5 tahun terakhir cenderung terus menurun. Meskipun di tahun 2016 ketimpangannya sempat sedikit meningkat, namun dalam 2 tahun terakhir kembali terus menurun. Hal ini dapat menjadi gambaran adanya perbaikan kesenjangan investasi yang menjadi semakin rendah dari tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 4.3 Indeks Williamson Wilayah Selatan-Selatan Tahun 2014-2018



Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://counsel.bps.go.id>



BAB V

KESIMPULAN

<https://sulsel.1908.com>

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://pulsel.bps.go.id>

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian tentang penghitungan ICOR di wilayah Selatan-Selatan selama periode 2014-2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Struktur perekonomian wilayah Selatan-Selatan serta masing-masing kabupaten yang terdapat didalamnya didominasi oleh 3 (tiga) kategori/lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; serta Konstruksi.
2. Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan pada tahun 2014-2018 cukup fluktuatif. Walaupun sempat mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016, ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun-tahun selanjutnya secara konsisten tumbuh positif namun terus mengalami perlambatan. Salah satu penyebabnya adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
3. Wilayah Selatan-selatan di tahun 2018 menyumbang sekitar 10 persen perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan. Kontribusi terbesar wilayah Selatan-Selatan tercermin pada 3 Lapangan Usaha yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,29 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 16,01 persen, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,61 persen.
4. Setengah perekonomian wilayah Selatan-Selatan merupakan kontribusi dari 2 kabupaten yaitu Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai.
5. Perekonomian wilayah Selatan-Selatan tahun 2018 dari sisi pengeluaran, pengeluaran terbesar digunakan untuk Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 58,62 persen, lalu disusul oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 37,88 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 12,09 persen.
6. Perkembangan nilai investasi di wilayah Selatan Selatan selama 5 tahun terakhir (2014-2018) terus mengalami peningkatan. Sejalan dengan itu, kontribusi terhadap investasi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat dari 9,31 persen di tahun 2014 menjadi 9,67 persen ditahun 2018.
7. 65,47 persen dari nilai investasi di wilayah Selatan-Selatan berasal dari Kabupaten Sinjai, Bantaeng, dan Bulukumba dengan besar kontribusi masing-masing lebih dari 20 persen. Sedangkan untuk Jeneponto dan Kepulauan Selayar memiliki kontribusi masing-masing sebesar 19,87 persen dan 14,66 persen.

8. Perhitungan ICOR menggunakan metode standar maupun akumulasi untuk wilayah Selatan-Selatan menunjukkan hasil yang sama, baik pada lag 0, lag 1, maupun lag 2 yang berarti tidak terjadi fluktuasi kondisi ekonomi yang ekstrim selama periode tahun 2014 hingga 2018 di wilayah tersebut
9. Wilayah Selatan-Selatan memerlukan investasi tambahan sebesar 5,39 miliar rupiah untuk meningkatkan PDRB (ADHK) sebesar 1 miliar rupiah pada tahun yang sama. Untuk meningkatkan output sebesar 1 miliar rupiah ditahun berikutnya (lag 1) dibutuhkan tambahan investasi sebesar 5,09 miliar rupiah. Sedangkan untuk meningkatkan output di tahun kedua, maka diperlukan tambahan investasi sebesar 4,64 miliar rupiah.
10. Perhitungan nilai koefisien ICOR untuk masing-masing kabupaten dengan metode akumulasi maupun standar memberikan hasil cukup berbeda kecuali pada kabupaten Sinjai yang memiliki nilai koefisien yang sama pada lag 1 dan lag 2. Bila di rata-rata perbedaan nilai koefisien metode standar sekitar 0,04 kali lebih besar dari nilai koefisien dengan metode akumulasi
11. Sepanjang 5 tahun terakhir (2014-2018) terjadi ketimpangan nilai investasi kategori sedang antar kabupaten di wilayah Selatan-Selatan. Distribusi nilai investasi pada masing-masing kabupaten di wilayah Selatan-Selatan masih belum merata. Namun demikian, dalam periode tersebut, indeks ketimpangannya memiliki tren yang terus menurun, nilai Indeks Williamson di Wilayah Selatan-Selatan dan menjadi gambaran adanya perbaikan kesenjangan investasi yang menjadi semakin rendah dari tahun-tahun sebelumnya.



<https://sulselk.s.go.id>

LAMPIRAN

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://pulsel.bps.go.id>

Lampiran 1

PDRB Lapangan Usaha Wilayah Selatan-Selatan Atas Dasar Harga Berlaku, 2014-2018 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.278.666,81	14.940.335,21	16.555.054,30	18.040.271,29	19.124.039,80
2 Pertambangan dan Penggalian	650.511,47	856.211,10	988.447,34	1.096.720,88	1.245.445,92
3 Industri Pengolahan	1.284.441,01	1.483.986,33	1.651.744,09	1.820.729,47	1.983.839,74
4 Pengadaan Listrik, Gas	32.481,28	31.761,31	35.746,70	42.652,94	48.055,38
5 Pengadaan Air	21.226,66	22.115,63	23.868,40	25.908,19	28.500,60
6 Konstruksi	3.573.620,63	4.155.673,01	4.777.390,13	5.511.297,10	6.483.353,34
7 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.506.692,42	4.100.146,73	4.735.031,82	5.380.391,62	6.258.338,21
8 Transportasi dan Pergudangan	478.024,30	591.723,36	648.624,27	698.473,73	778.462,05
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	132.656,81	155.583,04	178.697,45	209.234,94	244.143,67
10 Informasi dan Komunikasi	874.716,93	929.445,28	1.045.351,32	1.187.799,58	1.336.247,74
11 Jasa Keuangan	763.370,19	865.308,66	1.017.057,06	1.097.694,02	1.197.463,61
12 Real Estate	921.884,06	1.099.665,73	1.238.808,21	1.373.887,20	1.503.883,36
13 Jasa Perusahaan	16.426,06	18.710,81	20.692,41	23.213,02	26.564,51
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.999.396,18	2.337.817,93	2.470.517,91	2.666.687,15	3.017.056,51
15 Jasa Pendidikan	1.224.856,64	1.373.541,30	1.537.719,41	1.769.923,52	1.953.126,59
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	499.744,58	600.140,23	669.886,17	750.075,72	844.855,03
17 Jasa lainnya	213.305,09	253.003,89	282.855,43	322.031,54	376.904,32
PDRB	29.472.021,10	29.472.021,11	33.815.169,55	37.877.492,41	42.016.991,90

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 2

PDRB Lapangan Usaha Wilayah Selatan-Selatan Atas Dasar Harga Konstan, 2014-2018 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.830.444,82	10.259.688,91	10.940.368,40	11.585.279,97	11.956.983,84
2 Pertambangan dan Penggalian	411.336,16	483.637,50	543.310,56	608.141,82	672.882,58
3 Industri Pengolahan	1.001.418,24	1.075.821,18	1.138.702,74	1.202.093,86	1.276.733,95
4 Pengadaan Listrik, Gas	35.927,39	37.084,14	40.782,22	43.108,67	46.545,64
5 Pengadaan Air	18.895,53	19.037,93	20.298,98	21.625,21	23.217,52
6 Konstruksi	2.570.192,45	2.762.912,92	2.982.544,44	3.319.225,90	3.669.726,57
7 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.982.802,26	3.288.974,96	3.603.289,23	3.938.245,64	4.368.590,90
8 Transportasi dan Pergudangan	369.817,38	400.452,94	421.313,10	454.718,46	500.466,59
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	102.482,04	113.212,14	123.559,48	137.615,82	157.167,57
10 Informasi dan Komunikasi	801.709,44	875.264,65	962.478,12	1.048.268,89	1.154.132,31
11 Jasa Keuangan	566.408,64	608.450,67	692.360,21	709.532,80	742.264,48
12 Real Estate	741.732,42	815.400,88	881.905,12	947.369,43	1.000.775,63
13 Jasa Perusahaan	11.141,64	11.766,23	12.475,06	13.448,93	14.766,19
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.540.548,41	1.636.174,25	1.672.483,44	1.757.619,12	1.912.926,63
15 Jasa Pendidikan	1.005.985,94	1.075.172,75	1.156.771,37	1.267.995,98	1.371.038,57
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	383.143,59	423.476,72	447.774,03	482.314,75	527.400,27
17 Jasa lainnya	171.280,74	186.546,57	199.486,42	218.057,13	245.705,60
PDRB	29.472.021,10	22.545.267,09	24.073.075,35	25.839.902,90	27.754.662,37

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 3

Distribusi PDRB Lapangan Usaha Wilayah Selatan-Selatan Atas Dasar Harga Berlaku, 2014-2018 (Persen)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	45,06	44,18	43,71	42,94	41,17
2 Pertambangan dan Penggalian	4,36	4,39	4,36	4,33	4,27
3 Industri Pengolahan	12,13	12,29	12,61	13,12	13,96
4 Pengadaan Listrik, Gas	11,90	12,13	12,50	12,81	13,47
5 Pengadaan Air	6,78	6,91	6,52	6,35	6,50
6 Konstruksi	4,16	4,06	4,06	4,21	4,20
7 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,70	1,77	1,77	1,79	1,82
8 Transportasi dan Pergudangan	0,72	0,75	0,75	0,77	0,81
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	45,06	44,18	43,71	42,94	41,17
10 Informasi dan Komunikasi	4,36	4,39	4,36	4,33	4,27
11 Jasa Keuangan	12,13	12,29	12,61	13,12	13,96
12 Real Estate	11,90	12,13	12,50	12,81	13,47
13 Jasa Perusahaan	6,78	6,91	6,52	6,35	6,50
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,16	4,06	4,06	4,21	4,20
15 Jasa Pendidikan	1,70	1,77	1,77	1,79	1,82
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,72	0,75	0,75	0,77	0,81
17 Jasa lainnya	45,06	44,18	43,71	42,94	41,17
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 4

Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Wilayah Selatan-Selatan Terhadap Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018 (Persen)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19,39	18,96	18,74	18,77	18,39
2 Pertambangan dan Penggalian	3,07	3,98	5,05	5,33	5,49
3 Industri Pengolahan	3,08	3,14	3,12	3,17	3,34
4 Pengadaan Listrik, Gas	15,87	16,42	16,26	15,87	16,01
5 Pengadaan Air	5,98	5,98	6,06	6,01	6,10
6 Konstruksi	9,92	9,85	10,03	10,29	10,36
7 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,32	9,36	9,46	9,44	9,42
8 Transportasi dan Pergudangan	4,04	4,15	4,01	3,99	3,94
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,23	3,42	3,58	3,66	3,74
10 Informasi dan Komunikasi	5,99	5,91	5,95	5,96	5,87
11 Jasa Keuangan	7,05	7,06	7,08	6,95	6,93
12 Real Estate	8,00	8,09	8,33	8,65	8,77
13 Jasa Perusahaan	1,27	1,26	1,25	1,26	1,26
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,67	14,35	14,67	14,66	14,61
15 Jasa Pendidikan	7,90	7,94	8,04	8,14	8,00
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,07	9,21	9,14	9,16	9,20
17 Jasa lainnya	5,73	5,79	5,71	5,78	5,79
PDRB	9,89	9,93	10,04	10,11	10,05

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 5

PDRB ADHB Wilayah Selatan-Selatan Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	17.916.459,96	20.245.817,44	22.355.730,62	24.779.663,58	27.231.270,22
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	380.025,42	428.445,86	473.521,47	521.620,73	600.684,80
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.843.989,74	4.327.773,19	4.634.651,69	4.971.703,47	5.613.706,28
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	10.191.154,61	11.889.984,36	13.530.482,80	15.542.080,07	17.596.150,66
5 Perubahan Inventori	114.194,75	426.808,07	353.780,61	258.904,91	177.811,48
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-2.973.803,38	-3.503.659,36	-3.470.674,79	-4.056.980,86	-4.769.343,06
PDRB	29.472.021,11	33.815.169,55	37.877.492,41	42.016.991,90	46.450.280,38

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 6

PDRB ADHK Wilayah Selatan-Selatan Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	13.519.355,67	14.318.122,94	15.134.499,25	16.113.852,07	17.101.039,36
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	293.675,72	306.003,18	317.210,14	333.327,81	368.252,87
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.977.291,21	3.172.113,25	3.212.068,62	3.333.363,77	3.538.527,87
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	7.930.460,69	8.614.389,85	9.283.170,18	10.304.479,44	11.226.379,17
5 Perubahan Inventori	102.624,92	377.109,37	223.397,87	142.237,01	81.462,93
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-2.278.141,12	-2.714.663,24	-2.330.443,16	-2.472.597,73	-2.674.337,36
PDRB	22.545.267,09	24.073.075,35	25.839.902,91	27.754.662,37	29.641.324,85

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 7

Distribusi PDRB Wilayah Selatan-Selatan Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	60,79	59,87	59,02	58,98	58,62
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,29	1,27	1,25	1,24	1,29
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13,04	12,80	12,24	11,83	12,09
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	34,58	35,16	35,72	36,99	37,88
5 Perubahan Inventori	0,39	1,26	0,93	0,62	0,38
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-10,09	-10,36	-9,16	-9,66	-10,27
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 8

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Selatan-Selatan Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	6,15	5,91	5,70	6,47	6,13
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,68	4,20	3,66	5,08	10,48
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,91	6,54	1,26	3,78	6,15
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	8,89	8,62	7,76	11,00	8,95
5 Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-43,30	-53,78	-43,44	-31,91	-56,46
PDRB	8,07	6,78	7,34	7,41	6,80

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 9

Nilai Investasi Atas Dasar Harga Berlaku Wilayah Selatan-Selatan menurut Kabupaten Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

Kabupaten	2014	2015	2016	2017*	2018**
Kep. Selayar	1.489.207,06	1.736.120,66	2.014.644,88	2.280.333,86	2.580.424,31
Bulukumba	2.036.737,87	2.428.857,06	2.743.840,29	3.123.231,53	3.530.477,48
Bantaeng	2.299.899,50	2.646.161,33	2.998.446,75	3.481.276,47	3.984.027,78
Jeneponto	1.934.365,36	2.219.837,49	2.501.081,72	3.030.417,49	3.496.083,06
Sinjai	2.430.944,82	2.859.007,82	3.272.469,17	3.626.820,72	4.005.138,03
Selatan Selatan	10.191.154,61	11.889.984,36	13.530.482,80	15.542.080,07	17.596.150,66
Sulawesi Selatan	110.225.835,85	125.989.169,84	141.414.703,54	157.246.493,31	171.943.698,35

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 10

Nilai Investasi Atas Dasar Harga Konstan Wilayah Selatan-Selatan menurut Kabupaten Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

Kabupaten	2014	2015	2016	2017*	2018**
Kep. Selayar	1.119.635,65	1.218.467,92	1.323.847,01	1.438.095,23	1.570.144,34
Bulukumba	1.600.571,39	1.730.269,64	1.850.281,69	2.017.651,56	2.171.069,66
Bantaeng	1.795.395,78	1.945.653,83	2.096.952,23	2.342.414,22	2.563.864,35
Jeneponto	1.464.643,30	1.591.712,68	1.710.802,06	2.035.323,68	2.293.152,50
Sinjai	1.950.214,56	2.128.285,77	2.301.287,19	2.470.994,75	2.628.148,32
Selatan Selatan	7.930.460,69	8.614.389,85	9.283.170,18	10.304.479,44	11.226.379,17
Sulawesi Selatan	89.710.700,03	96.963.272,05	103.857.187,87	112.387.271,77	118.819.795,13

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 11

Kontribusi Nilai Investasi Wilayah Selatan-Selatan Terhadap Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018 (Persen)

Kabupaten	2014	2015	2016	2017*	2018**
Investasi ADHB	9,25	9,44	9,57	9,88	10,23
Investasi ADHK	8,84	8,88	8,94	9,17	9,45

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 12

Koefisien ICOR Lag 0 Wilayah Selatan-Selatan menurut Kabupaten

Kabupaten	ICOR Lag 0				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
Kepulauan Selayar	5,41	5,51	6,61	6,46	5,69
Bulukumba	3,17	4,80	4,04	4,05	5,57
Bantaeng	6,11	7,67	6,96	7,32	6,76
Jeneponto	4,18	5,10	4,05	4,48	6,10
Sinjai	5,93	5,60	5,99	5,89	5,65
Selatan Selatan	4,71	5,64	5,25	5,38	5,95

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 13

Koefisien ICOR Lag 1 Wilayah Selatan-Selatan menurut Kabupaten

Kabupaten	ICOR Lag 1			
	2014	2015	2016	2017*
Kepulauan Selayar	5,07	6,08	5,95	5,21
Bulukumba	4,44	3,77	3,71	5,17
Bantaeng	7,07	6,46	6,55	6,18
Jeneponto	4,69	3,76	3,76	5,42
Sinjai	5,13	5,54	5,49	5,31
Selatan Selatan	5,19	4,88	4,85	5,46

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 14

Koefisien ICOR Lag 2 Wilayah Selatan-Selatan menurut Kabupaten

Kabupaten	ICOR Lag 2		
	2014	2015	2016
Kepulauan Selayar	5,59	5,47	4,80
Bulukumba	3,49	3,47	4,74
Bantaeng	5,96	6,08	5,53
Jeneponto	3,46	3,50	4,55
Sinjai	5,08	5,08	4,94
Selatan Selatan	4,49	4,50	4,92

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 15

Indeks Williamson Wilayah Selatan-Selatan Tahun 2010-2018

Tahun	Indeks Williamson
2010	0,33
2011	0,35
2012	0,35
2013	0,36
2014	0,37
2015	0,37
2016	0,37
2017	0,36
2018	0,36

<https://sulsel.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. Haji Bau No. 6 Makassar 90125

Telp: (0411) 854838, Fax: (0411) 851225

Homepage: <https://sulsel.bps.go.id> Email: bps7300@bps.go.id

ISBN 978-623-7581-31-4



9 786237 581314